

EKUITAS
Akreditasi No.49/DIKTI/Kep/2003

ISSN 1411-0393

ANALISIS METODE PEMBERDAYAAN WANITA DI PROPINSI JAWA TIMUR

Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dra. Siti Rokhmi Fuadati, M.Si
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Female are citizen who have equal right and obligation with male. Female have huge potency to exert their time and power in domestic, public and social area (department), but in fact female have unequal position with male. Therefore it is necessary to hold female empowerment dealing with social, economic, and cultural condition.

Female empowerment often be unsuccesful since the empowerment method is not efficient. The power and precise female empowerment method would support the success of empowerment.

Keywords: *Female, Empowerment method, and Culture.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Istilah pemberdayaan diambil dari bahasa inggris “*empowerment*” yang berasal dari kata dasar “*power*” berarti “daya”, sehingga “*empowerment*” dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai pemberdayaan. Definisi pemberdayaan adalah suatu usaha yang bertujuan meningkatkan kekuatan atau daya pada pihak yang tidak beruntung, yang tidak berdaya atau yang kurang berdaya.

Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat (Wibowo, 2000:87). Pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara; meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui pemberian bantuan dana, pelatihan, pembangunan sarana prasarana fisik maupun sosial serta pengembangan kelembagaan daerah.

Pada penelitian ini yang diberdayakan adalah perempuan. Wacana publik yang sangat menyolok pada akhir-akhir ini adalah isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, ketidakadilan dan ketidaksetaraan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang dikenal dengan gender.

Di Indonesia, survey Angkatan Kerja Nasional 1990 menunjukan sekitar 61,21% dari 6.621 pekerja perempuan berpenghasilan kurang dari Rp50.000 perbulan, sedangkan laki-laki yang berpenghasilan sama jumlahnya hanya 24,83%, belum lagi ditambah dengan berbagai kasus dan persoalan buruh perempuan, misalnya upah yang diskriminatif, pelecehan seksual ditempat kerja, eksploitasi perempuan TKW, sampai hak cuti melahirkan bagi perempuan, yang semuanya masih sangat tidak menguntungkan bagi perempuan

Populasi wanita lebih banyak dari pada laki-laki, tetapi karena pendidikan yang relatif rendah, budaya patriakhi, stereotipi dan pemahaman agama yang salah membuat wanita sering tersurbordinasi. Dalam kehidupan sehari-hari ditemukan fakta, bahwa wanita mencurahkan waktu lebih banyak pada sektor publik, domestik maupun sosial.

Dari 30 wanita yang mendapat bantuan modal usaha pinjaman bergulir di desa Jipo, kecamatan Kepoh Baru, wanita atau istri seratus persen (100%) mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus anak, mencuci baju, memasak, dari 30 orang wanita atau istri juga mencari nafkah untuk keluarga. Pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki atau suami relatif kecil, untuk pekerjaan yang sama yaitu mengurus anak, mencuci baju dan memasak hanya 4 orang suami saja yang melaksanakan.

Sedangkan pada pola pengambilan keputusan terlihat bahwa laki-laki atau suami mendominasi pengambilan keputusan yang strategis. Untuk keputusan-keputusan strategis, wanita atau isteri tidak begitu mendapat porsi yang nyata. Hal ini dapat disebabkan karena ketidakmampuan dan ketidak-tahuan wanita itu sendiri. Ketidak-tahuan tersebut dapat diakibatkan karena pendidikan wanita yang relatif rendah.

Dari uraian diatas maka perlu dilakukan pemberdayaan perempuan. Masalahnya adalah bagaimana metode pemberdayaan yang tepat, mengingat banyak sekali pemberdayaan yang tidak berhasil. Metode pemberdayaan yang tepat menghasilkan peningkatan modal awal, peningkatan jumlah anggota kelompok atau penerima manfaat, berkurangnya kegagalan usaha dan peningkatan jumlah pengusaha wanita.

Metode pemberdayaan dalam penelitian ini ada 7 butir, yang merupakan hasil pemikiran peneliti selama mendampingi 5 kabupaten di Jawa Timur. Dikatakan melaksanakan metode pemberdayaan secara konsisten apabila melaksanakan metode pemberdayaan secara menyeluruh dan konsekuen.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar-belakang yang telah dikemukakan, dapat diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi upaya pemberdayaan wanita?
2. Apakah terdapat perbedaan penambahan modal di lima kabupaten yang menerapkan metode pemberdayaan secara tidak konsisten dan yang konsisten?
3. Apakah terdapat penambahan anggota di lima kabupaten yang melaksanakan metode pemberdayaan secara tidak konsisten dan yang konsisten?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberdayaan Wanita.
2. Mengetahui perbedaan penambahan modal di lima kabupaten yang menerapkan metode pemberdayaan secara tidak konsisten dan yang konsisten.
3. Mengetahui penambahan anggota di lima kabupaten yang melaksanakan metode pemberdayaan secara tidak konsisten dan yang konsisten.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan Wanita

Apabila melihat bagaimana wanita mencurahkan waktunya bekerja disektor domestik, publik dan sosial maka wanita mempunyai etos kerja yang tinggi, tetapi dalam pengambilan keputusan wanita tidak mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Hal ini mengisyaratkan wanita memang perlu untuk mendapat perhatian pemerintah, dan upaya pemberdayaan wanita mendesak untuk dilaksanakan.

Definisi pemberdayaan adalah suatu usaha yang bertujuan meningkatkan kekuatan atau daya pada pihak yang tidak beruntung, yang tidak berdaya atau yang kurang berdaya. Dalam merencanakan pemberdayaan maka harus dipahami terlebih dahulu beberapa konsep sebagai berikut (Sudarno, 1990):

1. Kekuatan atau daya.
2. Upaya pemberian kekuatan atau daya kepada seseorang atau sekelompok orang yang kurang atau tidak memiliki kekuatan.
3. Mengizinkan orang atau sekelompok orang untuk menerima, memiliki dan menggunakan kekuatan atau daya.
4. Mendistribusikan kembali kekuatan atau daya dari pihak yang mempunyai kekuatan atau daya kepada pihak yang tidak mempunyai kekuatan atau daya.

5. Ada pihak yang memberi kekuatan atau daya dan ada pihak yang menerima
6. Ada strategi, metode dan distribusi pemberdayaan.

Sehingga pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan komunitas adalah upaya pemberian kekuatan kepada masyarakat yang tertinggal.

Gunawan Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemadirian masyarakat (Wibowo, 2000).

Aspek yang diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Menciptakan suasana iklim usaha yang memungkinkan masyarakat berkembang.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui pemberian bantuan dana, pelatihan, pembangunan sarana prasarana fisik maupun sosial serta pengembangan kelembagaan daerah.
3. Melindungi melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah berlangsungnya persaingan yang tidak seimbang, namun sebaliknya diupayakan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh tim yaitu pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping dari tingkat Propinsi dapat berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan dari Pemerintah daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten. Usaha pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu/ tahapan-tahapan. Adapun maksud dari pentahapan tersebut untuk lebih mempermudah sasaran atau masyarakat menerima inovasi baru

Hipotesis

1. Terdapat perbedaan penambahan modal di empat kabupaten yang melaksanakan metode pemberdayaan secara tidak konsisten dengan yang konsisten.
2. Terdapat perbedaan penambahan anggota di empat kabupaten yang melaksanakan metode pemberdayaan secara tidak konsisten dengan yang konsisten.

METODE PENELITIAN

Metode Pemilihan Lokasi

Metode pemilihan lokasi ditentukan secara sengaja dengan alasan kelima daerah ini mendapat bantuan modal bergulir. Adapun kelima daerah penelitian tersebut adalah Kabupaten Jombang, Kediri, Lamongan, Bondowoso dan Lumajang.

Penentuan Responden

Penentuan responden dilakukan secara sengaja atau *purposive sampling*, yaitu jenis quota sampling. Adapun alasan menggunakan metode ini karena penelitian ini mengkaji fenomena pemberdayaan wanita, maka responden yang dipilih adalah daerah yang melaksanakan metode pemberdayaan masyarakat secara konsisten yaitu Kabupaten Lamongan dan empat Kabupaten yaitu Kabupaten lumajang, kabupaten Bondowoso, kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang yang tidak melaksanakan metode pemberdayaan secara konsisten. Kelima daerah ini mendapat bantuan modal dari BAPEMAS Jawa Timur.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden, alat yang digunakan adalah kuesioner. Data sekunder didapatkan dari data statistik daerah penelitian dan instansi terkait.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Menurut Travers (1978), analisis deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat penelitian telah dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan menurut Gay (1976), analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses penelitian. Selain analisis deskriptif juga dilakukan analisis statistik yaitu uji t dengan bantuan program SPSS.

Kriteria Pengambilan Keputusan:

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitasnya $< 0,05$, maka H_0 diterima.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitasnya $> 0,05$, maka H_0 ditolak.

Definisi Operasional Variabel

1. Pemberdayaan adalah pemberian bantuan modal pinjaman bergulir pada kelompok wanita yang memiliki usaha dengan besar bantuan adalah Rp25.000.000,- setiap kabupaten.

2. Penambahan modal adalah peningkatan jumlah bantuan modal karena adanya penambahan dari jasa atau bunga yang diberlakukan pada bantuan pinjaman bergulir.
3. Penambahan anggota adalah peningkatan jumlah sasaran atau penerima manfaat (wanita peminjam) dari bantuan modal bergulir.
4. Konsisten adalah melaksanakan metode pemberdayaan sejumlah 7 butir dengan menyeluruh dan lengkap.
5. Tidak konsisten adalah melaksanakan metode pemberdayaan tetapi tidak melaksanakan keseluruhan atau tidak lengkap.

PEMBAHASAN

Metode Pemberdayaan Wanita

Berdasarkan hasil pengamatan di lima kabupaten tersebut, maka dapat dirumuskan metode pemberdayaan masyarakat. Metode pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah pemberdayaan wanita, dimana wanita mendapat bantuan modal bergulir untuk meningkatkan usahanya. Metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey pendahuluan secara akurat meliputi: a. kelayakan usaha penerima/sasaran bantuan, b. potensi daerah, c. identifikasi wanita penerima bantuan dan d. persiapan petunjuk teknis dilapangan (besar bantuan yang layak diberikan, jumlah kelompok yang layak dihimpun, mekanisme kerja pengurus dan menetapkan peruntukan prosentase jasa modal pinjaman bagi kelanjutan keberadaan bantuan modal di desa).
2. Mensosialisasikan program pemberdayaan dengan tujuan agar sasaran atau penerima manfaat dalam hal ini adalah wanita, mengetahui peruntukan modal pinjaman, mekanisme kerja dari pengelolaan bantuan, batas maksimal bantuan yang boleh disalurkan. Pada saat berlangsungnya acara sosialisasi, dilakukan; a) pembentukan kepengurusan dengan cara memilih secara musyawarah wanita yang dianggap mempunyai kemampuan lebih dari pada wanita lainnya. Pengurus yang terpilih harus memenuhi kriteria: pengalaman, aktif, bertanggung jawab, supel/ mudah bergaul, dapat membaca dan menulis dan dapat melakukan pembukuan ringan. Adapun pengurus yang dipilih meliputi ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua kelompok, b) kesepakatan beberapa mekanisme seperti penentuan peruntukan prosentase jasa pinjaman (perhitungan ini untuk kurun waktu 1 tahun), yaitu 60% dikumpulkan untuk memperbesar modal, 30% untuk gaji pengurus dan 10% untuk pembelian alat tulis kantor dan operasional, pembagian prosentase jasa untuk menanggulangi dari penggunaan hal-hal yang tidak produktif (menyumbang mesjid yang tentu saja tidak ada tanda buktinya, hal ini terjadi di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang), c) menyediakan sarana dan prasarana untuk administrasi seperti; format perjanjian kredit, berita acara penyerahan dana yang ditandatangani oleh ketua

pengurus dan saksi-saksi seperti kepala desa, kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, format permohonan kredit, surat keputusan pembentukan kepengurusan pengelola bantuan di daerah, buku anggota, menyarankan adanya modal penyertaan, menyarankan menabung, mengangsur dengan cara tanggung renteng, menyiapkan format sanksi bagi yang tidak membayar lebih dari 3 bulan berturut turut tanpa alasan yang jelas, denda bagi yang menunda mengangsur, d) membentuk kelompok berdasarkan kedekatan rumah (domisili) atau kesamaan usaha, meminta menyiapkan perhitungan kelayakan usaha sederhana, e) menyepakati besarnya jasa/ bunga secara musyawarah, f) pengurus yang terpilih dianjurkan untuk membuka rekening guna menyalurkan dana, dan menyetorkan angsuran kedalam rekening bank, walaupun sehari setelahnya, diperbolehkan untuk diambil dan dipinjamkan lagi. Hal ini hanya untuk mendidik masyarakat/ wanita bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dengan selalu memiliki bukti nyata. Pada saat sosialisasi perlu mengundang tokoh masyarakat, perangkat desa dan kecamatan, wanita yang mempunyai usaha. Sedangkan wanita yang belum memiliki usaha masih dapat menikmati bantuan modal dengan cara wanita tersebut ikut menjadi pekerja/ karyawan/ magang pada wanita yang telah memiliki usaha. Upaya ini diharapkan dapat memberikan ketrampilan dan penghasilan kepada wanita yang belum memiliki usaha).

3. Membuka rekening untuk pengurus proyek. Adapun nama yang tertera pada buku rekening tabungan adalah nama proyek, buku dibawa oleh bendahara.
4. Melakukan monitoring setiap tiga bulan. Pada saat monitoring dievaluasi kemajuan bantuan modal, kesesuaian mekanisme kerja dengan petunjuk teknis, dan pembetulan kesalahan perhitungan pada pelaporan.
5. Mengadakan pelatihan teknis sesuai dengan usaha yang ditekuni wanita, dan pelatihan manajemen yang meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan wirausaha.
6. Melakukan penyelesaian masalah yang timbul dengan pendekatan musyawarah dan seni komunikasi. Masalah yang sering muncul misalnya; hanya ketua yang mengurus atau mengelola modal pinjaman, baik dari perhitungan keuangan, menagih dan membuat laporan. Hal ini bisa diselesaikan dengan; a) mengingatkan kembali bahwa pengurus mendapat gaji, pembuatan laporan harus dibuat oleh ketua, sekretaris, dan bendahara, harus pengurus yang mendatangani laporan dan diketahui oleh kepala desa/ lurah, b) kemalasan yang dialami oleh setiap pengurus, maka diingatkan kembali bahwa mereka dipilih karena dianggap mampu untuk memimpin, c) kurang cakupannya pengurus dalam pembuatan laporan keuangan, diselesaikan dengan memberi pelatihan khusus untuk pengurus tentang pembukuan ringan, pencatatan penambahan modal, dan pencatatan penambahan anggota dalam kelompok dan penambahan kelompok, d) intervensi laki-laki pada proyek pemberdayaan wanita, misalnya laki-laki menanyakan tentang peruntukan modal yang hanya diperuntukan wanita padahal laki-laki juga menginginkan, intervensi berasal dari suami, perangkat desa, atau tokoh masyarakat, maka penyelesaiannya adalah dengan menyampaikan kepada pengurus bahwa bantuan memang untuk wanita, agar wanita tidak tergantung seratus persen pada laki-laki.

7. Melakukan evaluasi bantuan selama setahun sekali, tanpa harus menghibahkan bantuan kepada daerah penerima bantuan, karena akan menimbulkan preseden buruk yaitu uang bantuan tidak dikembalikan pada pemerintah, tetapi waktu menggunakan bantuan modal diperpanjang. Waktunya yang diperpanjang memberikan kesempatan kepada wanita untuk menggunakan bantuan tersebut bagi pengembangan usaha.

Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Wanita

Dari hasil penelitian di lima kabupaten dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan wanita adalah sebagai berikut:

- a. Survey pendahuluan
- b. Sosialisasi proyek
- c. Rekening tabungan bagi pengurus
- d. Monitoring
- e. Pelatihan
- f. Penyelesaian masalah
- g. Evaluasi proyek pemberdayaan

Faktor-faktor hasil temuan dilapangan diperkirakan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemberdayaan wanita, karena apabila salah satu faktor tersebut tidak dilaksanakan secara konsekuen, maka pemberdayaan wanita tidak dapat berjalan dengan sukses.

Penerapan Metode Pemberdayaan Wanita Untuk Keberhasilan Pemberdayaan Wanita

Pada tabel 1 ditunjukkan terdapat empat kabupaten yaitu: Kabupaten Jombang, Kediri, Lumajang dan kabupaten Bondowoso. Pada 4 kabupaten ini, peneliti memang tidak mendampingi dari awal, sehingga tidak menerapkan 7 butir metode pemberdayaan tersebut, seperti survey pendahuluan yang tidak seksama, merekrut jumlah sasaran yang terlalu sedikit sehingga bantuan modal hanya dinikmati oleh sebagian wanita saja. Hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap ketidak-mampuan mengangsur karena hutang yang tidak sesuai dengan kelayakan usaha (tidak ada kelayakan usaha). Selain itu, pemilihan pengurus yang tidak dimusyawarahkan, hal ini membuat tidak diketahuinya kemampuan pengurus. Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Kediri dan Jombang. Pertumbuhan modal yang relatif sedikit karena pihak pengurus tidak meminjamkan lagi modal yang telah terkumpul, dengan alasan tidak mampu mengelola laporan keuangannya/ menghitung keuangannya. Kabupaten Bondowoso bahkan tidak mengalami pertumbuhan sama sekali, tidak terdapat bukti fisik pada setiap pengeluaran untuk

pembelian barang, alokasi yang salah pada pelaporan keuangan. Untuk uraian yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Evaluasi Proyek Pemberdayaan Wanita Tahun 2004/2005
Di Empat Kabupaten

ITEM PENILAIAN	BONDOWOSO	KEDIRI	LUMAJANG	JOMBANG
JUMLAH BANTUAN	Bantuan berkisar antara Rp200.000,- sampai Rp5.000.000,-	Bantuan masih relevan yaitu berkisar Rp2.000.000,- tetapi kepanitian program dari bupati ke jajaran di bawah, hal ini rawan terhadap penyelewengan.	Bantuan masih relevan berkisar antara Rp1.000.000,- Rp2.000.000,- untuk anggota dan ketua kelompok Rp3.000.000,- Rp4.500.000,-	Bantuan tidak relevan, terlalu besar yaitu Rp13.000.000,- dan macet/ nunggak karena ceknya kosong Penentuan besar bantuan oleh Lurah, tidak berdasarkan pada omset usaha peminjam.
MEKANISME PENYA- LURAN BANTUAN	Bantuan diserahkan di Kabupaten, ada kuitansi penyerahan , serta terdapat bukti fisik akad serah terima.	Ketua kelompok membuat rekening, setelah itu Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. mentransfer uang bantuan kepada rekening kelompok.	Bantuan ditransfer atas nama pribadi ketua, disarankan agar memisahkan rekening atas nama pribadi dan proyek, agar lebih transparan.	Bantuan diserahkan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. melalui rekening ketua kelompok.
ANGSURAN	Angsuran disetorkan kepada Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten, alasannya Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab.	Angsuran dikumpulkan pada ketua kelompok.	Angsuran dikumpulkan pada ketua kelompok dan pada saat itu juga dihutangkan kembali, kemudian	Angsuran dikumpulkan kepada ketua kelompok dan tidak dipinjamkan kembali. Disaran untuk dipinjamkan

	takut bantuan hilang. Hal ini tidak sesuai juknis, sehingga disarankan agar kantor pemberdayaan Perempuan Kab. membuka rekening untuk kelompok.		disarankan agar menaruh kedalam rekening terlebih dahulu, setelah itu dapat dipinjamkan kembali.	kembali dan pemberian kursus pada bendahara tentang cara pembukuannya.
SASARAN	Sasaran relatif memenuhi syarat, karena wanita pedesaan yang memiliki usaha.	Sasaran relatif memenuhi syarat, karena wanita pedesaan yang memiliki usaha.	Sasaran relatif tidak memenuhi syarat, karena wanita perkotaan, padahal ada daerah yang lebih cocok yaitu Kec. Gucialit.	Sasaran relatif tidak memenuhi syarat, karena ada wanita yang memiliki usaha sepatu, diberi bantuan Rp13.000.000,-
KELOMPOK	Kelompok dibentuk oleh kepala desa, selanjutnya diusulkan kepada Kecamatan dan dilanjutkan kepada Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten. Terdapat 3 kelompok.	Kelompok dibentuk oleh kepala desa, selanjutnya diusulkan kepada Kecamatan dan dilanjutkan kepada Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten. Terdapat 2 kelompok.	Kelompok dibentuk oleh kepala desa, selanjutnya diusulkan kepada Kecamatan dan dilanjutkan kepada Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten. Terdapat 7 kelompok.	Kelompok dibentuk oleh kepala desa, selanjutnya diusulkan kepada Kecamatan dan dilanjutkan kepada Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten. Terdapat 4 kelompok.
AKTIVITAS KELOMPOK	Kelompok berjalan saling membantu.	Aktivitas kelompok hanya meliputi pemasaran.	Tidak ada aktivitas kerjasama dalam Kelompok.	Tidak terlihat aktivitas kerjasama dalam kelompok sepatu, tetapi nampak pada usaha catering dan kue.

PEMBUKUAN	Terdapat rekayasa, karena bantuan hanya Rp200.000,- sampai Rp300.000,- tetapi ditulis Rp1000.000,- per-anggota. Namun telah diperbaiki mekanismenya.	Pembukuan relatif lemah, banyak pengeluaran yang tidak relevan, pemberian pinjaman tidak serentak.	Pembukuan relatif baik, tetapi masih kurang transparan.	Pembukuan relatif baik, tetapi lemah dalam perhitungan.
LOKASI	Telah sesuai juknis yaitu pedesaan, Desa Curah Dami, Kec. Curah Dami.	Sesuai dengan juknis, daerah pedesaan, Desa Titik, Kec. Semen.	Dipilih kota karena lokasinya RW, bukan desa. Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang.	Sesuai juknis yaitu daerah pedesaan, Desa Alang alang Caruban, Kec. Jogoroto.
KESESUAIAN JUKNIS	Tidak sesuai dengan juknis karena angsuran dihimpun oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. bukan kelompok dan kelompok tidak memiliki rekening.	Tidak sesuai juknis karena bantuan digunakan untuk pembelian peralatan, tetapi tidak dapat menunjukkan pertanggung jawaban kepemilikannya.	Tidak mentaati juknis, alasannya berat pelaksanaanya dalam menyetorkan angsuran di bank, telah disarankan dan menuruti menyetor di bank.	Tidak sesuai juknis karena bantuan terlalu besar.
PENGURUS	Pengurus tidak begitu menguasai administrasi dan lemah dalam mengarsip.	Pengurus mengalami tekanan.	Pengurus relatif mumpuni.	Pengurus relatif tidak begitu bertanggung jawab, dan lemah dalam pembukuan.
USAHA PENERIMA BANTUAN	Semua penerima berusaha bordir.	Usaha bordir.	Bakso, pracangan, minuman, mlijo, catering, jamu, dan bordir.	Sepatu, catering, kue, dan tempe.

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat perbedaan yang nyata pada daerah yang menerapkan metode pemberdayaan dan daerah yang tidak menerapkan metode pemberdayaan. Evaluasi ini dilaksanakan setelah satu tahun. Penerapan metode pemberdayaan yang tidak konsisten menyebabkan pertumbuhan modal dan pertumbuhan penerima manfaat atau sasaran tidak begitu menggembirakan.

Tabel 2
Evaluasi Metode Pemberdayaan Di Lima Kabupaten

No	Kabupaten	Peningkatan Modal (Rp)	Pertumbuhan (%)	Peningkatan jumlah Anggota (Orang)		Pertumbuhan (%)
				Awal	Ahir	
1	Lamongan	32.925.000	31,70	40	90	125,00
2	Bondowoso	25.000.000	0,00	16	16	0,00
3	Jombang	27.200.000	8,80	16	17	6,25
4	Kediri	27.871.500	11,49	16	20	25,00
5	Lumajang	28.852.500	15,41	36	120	233,00

Sumber: Data Primer diolah

Tabel 2 menunjukkan bahwa ada satu kabupaten yang menerapkan metode pemberdayaan sebanyak 7 butir dan empat kabupaten yang tidak menerapkan metode pemberdayaan. Kelima kabupaten ini mendapat bantuan dari Propinsi Jawa Timur yaitu dari Badan Pemberdayaan Masyarakat. Besar bantuan yang diberikan sebesar Rp25.000.000,- dan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti selama 1 tahun.

Di Kabupaten Lamongan tepatnya di Desa Karang Binangun, Kecamatan Karang Binangun diterapkan metode pemberdayaan sebanyak 7 butir tersebut dengan konsisten. Kesempatan untuk menerapkan metode pemberdayaan ini karena Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui peneliti menyerahkan langsung dana maupun penerapan mekanisme pengelolaannya. Hasilnya adalah; jumlah sasaran yang dapat direkrut relatif besar, kelompok yang terbentuk memiliki usaha yang kebetulan sama dan lokasinya berdekatan (bertetangga); kemungkinan untuk macet sangat kecil karena jumlah bantuan relatif tidak terlalu besar, yaitu dari Rp300.000,- sampai Rp1000.000,-; diadakan survey pendahuluan terlebih dahulu terhadap lokasi wanita yang memiliki potensi usaha; dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dana diserahkan; pada waktu dana diserahkan terdapat bukti nyata tentang penyerahan dana, disaksikan oleh tokoh masyarakat, dan aparat dari kepala desa sampai camat; pemilihan ketua pengurus dilakukan secara musyawarah dan terbuka sehingga mereka memilih sesuai dengan hati nurani, tanpa ada tekanan; dilakukan pelatihan teknis dan manajemen; terdapat monitoring setiap 3 bulan sekali, dan evaluasi. Pertumbuhan modal di Kabupaten Lamongan sebesar Rp32.925.000,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 31,7%. Pertumbuhan sasaran yang menikmati bantuan modal dari

mulai adanya proyek (40 orang) meningkat menjadi 90 orang. Kabupaten Lumajang relatif baik pertumbuhan modal dan sasaran walaupun tidak konsekuen melaksanakan metode pemberdayaan, karena pengurus benar-benar telah berpengalaman, berprofesi guru sekolah dasar, bantuan relatif sesuai dengan petunjuk teknis serta perangkat kelurahan yang aktif mengawasi dan tidak mengganggu keuangan bantuan modal.

Pengujian terhadap Penambahan Modal dan Penambahan Anggota

Uji t digunakan untuk menjawab apakah ada perbedaan rata-rata penambahan modal dan penambahan anggota di empat kabupaten yang tidak melaksanakan metode pemberdayaan secara konsisten dengan penambahan modal dan penambahan anggota di Kabupaten Lamongan yang melaksanakan metode pemberdayaan modal secara konsisten. Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung untuk penambahan modal sebesar $-6,966$. Apabila dibandingkan dengan t tabel sebesar 3,182, atau apabila didasarkan pada angka signifikansi sebesar 0,006 ($<0,05$), maka H_0 ditolak atau terdapat perbedaan penambahan modal di empat kabupaten yang tidak melaksanakan metode pemberdayaan secara konsisten dengan Kabupaten Lamongan.

Hasil uji t untuk penambahan anggota menunjukkan nilai t hitung sebesar $-1,826$. Apabila dibandingkan dengan t tabel sebesar 3,182 atau berdasarkan nilai probabilitasnya sebesar 0,165 (lebih besar dari 0,05), maka H_0 tidak dapat ditolak, artinya tidak ada perbedaan penambahan anggota pada 4 kabupaten yang melaksanakan metode pemberdayaan secara tidak konsisten dengan Kabupaten Lamongan yang melaksanakan metode pemberdayaan secara konsisten. Hasil tersebut dapat dikarenakan di Kabupaten Lamongan sejak awal merekrut relatif banyak anggota tetapi pengurus kurang begitu menguasai administrasi keuangan sehingga perguliran relatif kurang cepat, berarti penambahan anggota menjadi kurang cepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemberdayaan wanita adalah upaya peningkatan kemampuan wanita, baik kemampuan dibidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Agar wanita mempunyai kemampuan maka perlu diberikan kekuatan. Kekuatan tersebut dapat berupa bantuan modal bergulir, pelatihan baik teknis maupun manajemen, pembangunan sarana fisik dan sosial di pedesaan.

Dalam usaha pemberdayaan wanita perlu adanya metode yang tepat. Metode yang tepat dapat menunjang upaya pemberdayaan menjadi berhasil. Adapun metode pemberdayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan survey pendahuluan secara akurat.
 - b. Mensosialisasikan program pemberdayaan.
 - c. Membuka rekening khusus untuk pengurus proyek pemberdayaan.
 - d. Melakukan monitoring setiap tiga bulan sekali.
 - e. Mengadakan pelatihan teknis sesuai dengan usaha yang ditekuni wanita dan pelatihan manajemen meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan wirausaha.
 - f. Melakukan penyelesaian masalah.
 - g. Melakukan evaluasi bantuan selama setahun sekali, tanpa harus menghibahkan bantuan kepada daerah penerima bantuan.
2. Terdapat perbedaan antara penambahan modal pada lima kabupaten yang melaksanakan metode pemberdayaan secara tidak konsisten dengan kabupaten yang melaksanakan metode pemberdayaan secara konsisten (Lamongan).
 3. Tidak terdapat perbedaan antara penambahan anggota pada lima kabupaten yang melaksanakan metode pemberdayaan secara tidak konsisten dengan kabupaten yang melaksanakan metode pemberdayaan secara konsisten (Lamongan).

Saran

1. Untuk keberhasilan pemberdayaan wanita, perlu dilaksanakan secara konsekuen metode pemberdayaan wanita.
2. Pada petunjuk teknis perlu ditambah:
 - a. Rentang besarnya pinjaman yang bisa diberikan dan harus berdasarkan kelayakan usaha. Hal ini dikarenakan telah terjadi di Kabupaten Jombang, yaitu terdapat pinjaman Rp13.000.000,- untuk satu orang tetapi macet. Sesuai dengan teori portfolio, lebih baik meminjamkan pada banyak orang dalam jumlah bantuan relatif kecil. Apabila salah satu orang macet, masih banyak yang bisa mengembalikan dan kelompok diharuskan melaksanakan tanggung renteng.
 - b. Dalam petunjuk teknis perlu ditambahkan bahwa lokasi penerima bantuan lebih diarahkan pada wanita pedesaan.
 - c. Anggota kelompok diusahakan jumlahnya banyak, yaitu berkisar antara 5 sampai 10 kelompok perdesa, dan jumlah anggota juga besar, 1 kelompok terdiri dari 5 sampai 10 orang.
3. Pemahaman mengenai pelaksanaan teknis perkabupaten harus ada kesamaan pengertian agar tidak diartikan sendiri-sendiri oleh Kantor Pemberdayaan Wanita

Kabupaten. Adapun yang masih dalam koridor dapat ditolerir perbedaannya perkabupaten adalah;

- a. Besar pinjaman disesuaikan dengan skala usaha di desa masing-masing tetapi tetap pada rentang yang telah tertuang pada petunjuk teknis.
- b. Kelompok yang terbentuk boleh berdasarkan kedekatan domosili tetapi boleh berdasarkan usaha.
- c. Bunga ditentukan berdasarkan musyawarah, berikut tunggaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Pamintasih, Hastharti E. 2002. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Industri Berwawasan Gender*. Pusat Penelitian Wanita. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya. Malang.
- Poesponegoro, Ningki. 2004. *Kemandirian Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga*. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum. Dewan Pimpinan Propinsi Himpunan Wanita Karya Jawa Timur.
- Sudarno, 1990. *Pengaruh Pendidikan Tenaga Kerja Wanita Terhadap Produktivitas Kerja Industri Garmen*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Susantinah, Nugrahini W. 1995. *Peranan Wanita Pengrajin Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Desa Klompor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*.
- Susantinah, Nugrahini W. 2004. *Peranan Wanita dan Pola Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga Wanita Pedesaan di Desa Jipo Kecamatan Kepoh Baru Kabupaten Bojonegoro*.
- Susantinah, Nugrahini W. 2004. *Tingkat Kemakmuran Rumah Tangga Wanita Desa dan Preferensi Wanita Terhadap Kelompok Usaha di Desa Jipo Kecamatan Kepoh Baru Kabupaten Bojonegoro*.
- Sutikto. 2002. *Penelitian/ Pengkajian Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengembangan Informasi Bursa Tenaga Kerja di Jawa Timur*. Kerjasama Antara Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur Dengan Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Thohari, Endang S. 2002. *Sistem Pembiayaan Agribisnis*. Makalah. Pusat Penelitian Peranan Wanita Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya Malang.

- Wibowo, Rudi. 2005. *Memahami Akar Permasalahan Menuju Revitalisasi Pertanian Yang Bermartabat*. Diskusi. Universitas Brawijaya Malang.
- Wijaya, Hesti R. 2002. *Dampak Globalisasi Pada Perempuan Industri Kecil/ Menengah Dan Usaha Kecil Menengah (IKM/UKM)*. Pusat Penelitian Wanita. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya Malang.
- Winarno, Budi, 2003. *Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan Indonesia Vis A Vis Taiwan, Thailand dan Filipina*. Media Pressindo. Yogyakarta.